

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Menurut Donaldson dan Davis, (1991) dalam Anton, (2010) *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. teori *stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara

maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Haliah, 2012 dalam Wahida 2015)

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan terperinci terkait dengan data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan guna untuk pengambilan keputusan.

Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi merupakan alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Secara prinsip akuntansi adalah alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015)

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

2.1.2.1. Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Menurut peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut Bastian (2010, h; 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari

proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2011, h; 143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban. (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Kesimpulan dari tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan dan menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan suatu keputusan dan berguna untuk kelangsungan suatu entitas atau suatu pemerintahan daerah.

2.1.2.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2010) komponen laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva utang dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos sebagai berikut :

- a. Properti, publik dan peralatan
- b. Aktiva tidak berwujud
- c. Aktiva keuangan (selain butir d, f dan h)
- d. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas

- e. Persediaan
 - f. Pemulihan transaksi non pengukuran, termasuk pajak dan transfer
 - g. Piutang dari transaksi pertukaran
 - h. Kas dan setara kas
 - i. Utang pajak dan transfer
 - j. Utang karena transaksi penukaran
 - k. Cadangan (*provision*)
 - l. Kewajiban tidak lancar
 - m. Partisipasi minoritas
 - n. Aktiva/ekuitas neto
2. Laporan kinerja keuangan (laporan surplus-defisit)

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit atau laporan laba rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut ini:

- a. Pendapatan dari aktivitas operasi
- b. Suplus atau defisit dari aktivitas operasi
- c. Biaya keuangan (biaya pinjaman)

- d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas
- e. Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
- f. Pos-pos luar biasa
- g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
- h. Surplus atau defisit neto untuk periode

3. Laporan perubahan aktiva (Ekuitas neto)

Laporan perubahan aktiva (ekuitas neto) menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam suatu laporan keuangan. Perubahan ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama satu periode. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva ekuitas neto meliputi sebagai berikut :

- a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode.

c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen aset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi, informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi, kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan sektor publik

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ini menyajikan semua informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Maing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperbaiki, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa baik masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

4. Laporan Operasional (LO)

Laba Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laba operasional terdiri dari :

a. Pendapatan laba operasional (LO)

Merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih suatu pemerintahan.

b. Beban

Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau oleh entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi uang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusa maupun daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informai lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari beberapa pendapat tentang komponen laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang

lebih terhadap komponen-komponen laporan keuangan ini sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Laporan keuangan dibuat untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka dari itu memahami tujuan dan manfaat setiap komponen-komponen laporan keuangan sektor publik sangat penting dilakukan.

2.1.2.4. Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2010) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan

material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

2.1.2.5. Indikator Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikal.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimasuk.

2.1.3. Pengertian Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengihtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan (Nordiawan, 2012, h; 1). Menurut Sujarweni, (2015) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan.

Kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas adalah Akuntansi dapat di katakan sebagai proses pengidentifikasian data-data keuangan suatu entitas ataupun pemerintahan yang dioleh secara relevan dan dapat digunakan oleh pengguna informasi untuk membuat suatu keputusan.

2.1.4. Pengertian Pemahaman Akuntansi

2.1.4.1. Pemahaman Akuntansi

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2006) dalam (Yuliani, 2010) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara pembuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini berarti

orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang di terapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan.

Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut (Bastian, 2010, h; 318) adalah :

1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi ini yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2) Analisis Bukti Transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3) Mencatat Data Transaksi

Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengelompokkan dan Pengikhtisarkan data yang dicatat (*posting*)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah disebut dengan *posting*.

5) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reabilitasnya.

2.1.4.2. Indikator Pemahaman Akuntansi

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005) dan (Poerwadarminta 2006) dalam Yuliani (2010) indikator dari pemahaman akuntansi adalah :

1) Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi

Pemahaman akuntansi sangat diperlukan dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Paham terhadap komponen-komponen laporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi merupakan suatu keharusan seseorang dalam menyusun laporan keuangan.

2) Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan

Orang yang akan menyusun suatu laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan.

2.1.5. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.5.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam suatu entitas atau pemerintahan untuk menunjang keberhasilan dalam suatu organisasi. Menurut Sumarsono (2003) sumber daya manusia

merupakan manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Menurut (Sofyandi, 2013) sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi. Menurut Mardiasmo (2002, h; 146) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat berhemat waktu pembuatan laporan keuangan disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang karyawan atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu pemerintah apabila sumber daya manusia berkompeten dan berkualitas, maka dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu.

2.1.5.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini dkk, 2015). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau kelembagaan, untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien (Rahayu dkk, 2014). Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ihsanti (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil,

berupa keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.5.3. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (keputusan Kepala BKN No. 46 Tahun 2007). Menurut (Spencer dan Spencer, 1995) dalam (Sutrisno, 2009, h; 204-205) Indikator dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- 1) Pengetahuan

Kesadaran dalam bidang kognitif. Karyawan harus mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

- 2) Keterampilan

Keterampilan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3) Sikap

Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar.

Misalnya, krisis ekonomi, kenaikan gaji dll.

2.1.6. Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.6.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2008) sistem akuntansi keuangan adalah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Adapun menurut Halim (2012, h; 43) sistem akuntansi keuangan adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sedangkan menurut Nordiawan (2010, h; 201) dan

Pemendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang akuntan mulai dari pengumpulan data hingga membuat laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat dilakukan menggunakan komputer maupun secara manual.

Salah satu tujuan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu dalam menyediakan suatu laporan keuangan yang lebih lengkap, akurat dan cermat sehingga pemerintah dapat menyediakan atau menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan oleh berbagai pihak internal maupun eksternal. Menurut Mardiasmo (2004, h; 147)

akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi, sehingga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

2.1.6.2. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Darise, (2008) dalam Aryani (2017) tujuan dari akuntansi pemerintahan mengatakan bahwa ada beberapa tujuan akuntansi pemerintahan yaitu :

1. Pertanggungjawaban memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.
2. Manajerial akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, anggaran, perumusan

kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Nordiawan, dkk (2007) tujuan sistem akuntansi pemerintah adalah :

1. Menjaga aset dilakukan agar aset pemerintahan dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar.
2. Memberikan informasi yang relevan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas
3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya (*reliability*) tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien (*feedback and predictability*).

Beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan tujuan adanya sistem akuntansi pemerintahan adalah guna mempermudah proses pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang diberikan kepadanya dan dapat digunakan untuk pengawasan demi menghindari kemungkinan penyelewengan yang mungkin terjadi.

2.1.6.3. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai akuntansi yang berterima umum Pemendagri No 29 Tahun 2002. Menurut Masisi (1978) dalam Roviyantie (2011) menjelaskan aturan-aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.

- 2) Pengklasifikasian kegiatan operasi secara cepat.
- 3) Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas.
- 4) Menghitung pengaruh masing-masing operasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DIY	Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
2.	Devi Roviyantie (2012)	Pengaruh sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap	Variabel sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Variabel penerapan sistem

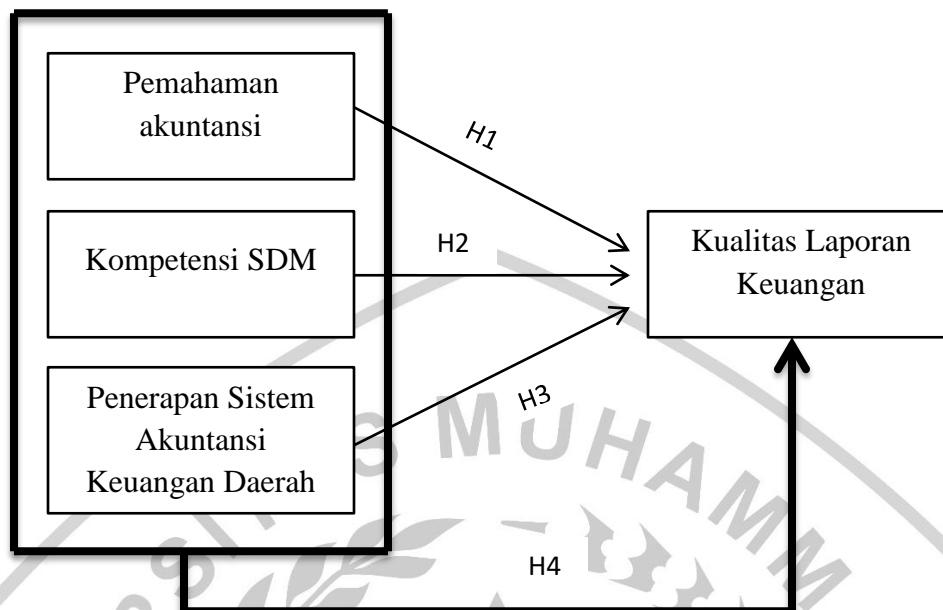
		kualitas laporan keuangan daerah	akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3.	Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kalitas laporan keuangan	Variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia Variabel pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar (2010)	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Variabel peran internal audit berpengaruh terhadap

			kualitas laporan keuangan
6.	Siska Yulia Defitri (2016)	Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
7.	Ni Ketut Rusmiadi Putri, Nyoman Ari Surya Darmawan, Desak Nyoman Sri Werastuti (2015)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
8.	Nyoman Triyadi Agustiawan, Ni Ketut Ramini (2016)	Pengaruh sistem berbasis akrual, teknologi informasi dan SPIP pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai moderasi	Variabel sistem berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Variabel teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Kompetensi SDM mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan

			Kompetensi SDM mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan
--	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini mencoba untuk mencari pengaruh pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonogiri. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan masing-masing variabel maka kerangka pemikiran dapat ditunjukkan dengan pola berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :  : Parsial
 : Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat terlihat bahwa penelitian ini berusaha akan menjelaskan hubungan antara tiga variabel independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang pertama adalah pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi dilihat hubungannya dengan kualitas laporan keuangan yaitu apabila seseorang yang menggunakan akuntansi itu mengerti bagaimana proses akuntansi yang akan disusun sampai menjadi laporan keuangan dan berpedoman pada standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan, maka kualitas laporan keuangan suatu pemerintah akan semakin membaik.

Variabel independen yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia. dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menyusun suatu laporan keuangan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dapat membuat laporan keuangan yang baik, handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Variabel independen yang ketiga yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan sangat diperlukan oleh suatu pemerintah dikarenakan sistem akuntansi keuangan merupakan prosedur penyusunan laporan akuntansi, apabila seseorang belum memahami sistem akuntansi keuangan berarti belum bisa menyusun laporan keuangan yang baik.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014, h; 64).

2.4.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Orang yang memiliki pemahaman akuntansi merupakan orang yang mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku (Poerwadarminta, 2006)

dalam (Yuliani, 2010). Menurut Mahmudi (2011, h; 143) laporan keuangan merupakan output dan sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Sebuah entitas ataupun sebuah perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan orang yang memahami dan pandai dalam penyusunan laporan keuangan dan tahu proses akuntansinya dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan Yuliana dkk, (2015) yang berjudul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan dari uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan dari penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H₀ : Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

Ha₁ : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

2.4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Menurut Ihsanti (2014) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apabila suatu pemerintahan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam memahami cara membuat laporan keuangan dengan baik dan benar, maka suatu kualitas laporan keuangan suatu pemerintah akan semakin membaik.

Penelitian yang dilakukan Roviyantje (2012) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan dari penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H0₂ : Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ha₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.4.3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses penampilan data, pencatatan, pengikhtisarkan sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2010, h; 201).

Penerapan sistem akuntansi keuangan pada suatu pemerintahan daerah apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas. Begitu sebaliknya jika penerapan sistem keuangan di terapkan oleh suatu entitas ataupun pemerintahan daerah dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan bagus.

Penelitian yang dilakukan oleh Patra dkk (2015) dengan judul pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas suatu entitas atau suatu pemerintahan harus menerapkan sistem akuntansi keuangan, diduga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan:

H₀₃ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Ha₃: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.4.4. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pemahaman akuntansi sangat penting bagi sumber daya manusia yang bekerja di suatu entitas atau suatu pemerintah, dikarenakan paham betul bagaimana proses akuntansi dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang telah diterapkan. Semakin paham proses akuntansinya maka akan semakin berkualitasnya suatu laporan keuangan yang telah disusunnya.

Suatu penyusunan laporan keuangan juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya. Kompetensi sumber daya

manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu entitas atau suatu pemerintah guna untuk merencanakan dan mengendalikan suatu entitas yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang berkompeten juga diperlukan guna dalam penyusunan suatu laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur yang harus diterapkan oleh suatu pemerintah digunakan untuk mempertanggungjawabkan kondisi laporan keuangan pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan mewujudkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

H₀₄ : Pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ha₄ : Pemahaman akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.